



PAPER – OPEN ACCESS

Manajemen Risiko Berbasis Kelompok Sadar Bencana di Sulawesi Selatan

Author : Muh. Iqbal Latief dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.611
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Manajemen Risiko Berbasis Kelompok Sadar Bencana di Sulawesi Selatan

Risk Management Based on Disaster Awareness Groups in South Sulawesi

Muh. Iqbal Latief^a, Sultan Djibe^b, Arsyad Genda^c

^{a,b,c}Sosiologi Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar 90245, Indonesia

Email : muhilberkelana@gmail.com, sultan-djibe60@yahoo.com, garsyad@yahoo.com

Abstract

The flood disaster that struck the Province of South Sulawesi (South Sulawesi) at the end of January 2019, was the worst natural disaster in the past 20 (twenty) years. Of the 24 (twenty four) districts and cities in South Sulawesi, there are 6 (six) districts and cities experiencing very poor conditions, namely the Regencies of Jeneponto, Maros, Gowa, Takalar, Barru and Makassar. As a result of this disaster, tens of thousands of families lost their homes, property was destroyed, social facilities such as schools and houses of worship were also severely damaged and some were destroyed. Even more pathetic, because more than a hundred people died. This results from an imbalance of ecosystems causing serious problems. Community understanding of the need to maintain ecosystem balance is still very low coupled with the socioeconomic situation which makes the community more pragmatic. The problem is, how do you increase the awareness of the community in maintaining the balance of the ecosystem? And how to foster disaster-conscious attitudes and behavior for the community, especially in disaster-prone areas? Therefore, the writing of this article aims to comprehensively examine people's attitudes related to maintaining ecosystem balance and fostering disaster-conscious behavior in the community, especially in disaster-prone areas as an alternative to disaster risk management. The method used is qualitative with the type of case study studies. The selection of informants is done purposively and the data processed are primary and secondary. From the results of this study it was found, the increasingly severe environmental damage became the main trigger of natural disasters that occurred in South Sulawesi at the end of January 2019. This environmental damage, is dominant because of the very exploitative behavior of the community towards the environment. For example, what happened in Gowa district, the big floods that occurred because around the Jeneberang River and Bili-Bili Dam areas - sand mining activities have been going on for decades. Likewise, the Mount Bawakaraeng area, which used to function as a buffer against flooding, has long been deforested as a result of causing landslides whenever there is heavy rain. This condition also occurs in the districts of Jeneponto, Maros and others - these areas are vulnerable to heavy rainfall. To overcome this serious problem, one alternative is to form community groups that are aware of disasters. This strategy of forming disaster awareness groups, by combining approaches from above (government) and from below (the community)

Keywords: disaster risk management, disaster awareness group, South Sulawesi environment;

Abstrak

Musibah banjir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di akhir Januari 2019, merupakan bencana alam yang terparah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir ini. Dari 24 (dua puluh empat) kabupaten dan kota di Sulsel, ada 6 (enam) kabupaten dan kota mengalami kondisi sangat memprihatinkan yaitu Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Takalar, Barru dan Makassar. Akibat dari bencana ini, puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda musnah, fasilitas sosial seperti sekolah dan rumah ibadah juga rusak berat dan ada yang hancur. Lebih mengenaskan, karena menimbulkan korban jiwa meninggal dunia lebih dari seratus orang. Hal ini akibat dari ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan masalah yang serius. Pemahaman masyarakat tentang perlunya menjaga keseimbangan ekosistem, masih sangat rendah ditambah lagi dengan situasi sosial ekonomi yang membuat masyarakat makin pragmatis. Masalahnya, bagaimana cara meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Dan bagaimana menumbuhkan sikap dan perilaku sadar bencana bagi masyarakat khususnya

di kawasan yang rawan bencana? Karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sikap masyarakat terkait dengan kepedulian menjaga keseimbangan ekosistem dan menumbuhkan perilaku sadar bencana di masyarakat khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana sebagai alternatif manajemen risiko bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis kajian studi kasus. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan data yang diolah adalah primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan, makin parah kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama dari bencana alam yang terjadi di Sulsel akhir Januari 2019.. Kerusakan lingkungan ini, dominan karena perilaku masyarakat yang sangat eksploitatif terhadap lingkungan. Misalnya saja yang terjadi di kabupaten Gowa, banjir besar yang terjadi karena di sekitar kawasan Sungai Jeneberang dan Dam Bili-Bili – kegiatan penambangan pasir sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Begitu juga kawasan Gunung Bawakaraeng yang tadinya berfungsi sebagai penyangga banjir, karena sudah lama digunduli akibatnya menimbulkan longsor setiap ada hujan deras. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Jeneponto, Maros dan lainnya – daerah-daerah ini rentan terhadap curah hujan yang besar. Untuk mengatasi masalah serius ini, maka salah satu alternatifnya dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang sadar bencana. Strategi pembentukan kelompok sadar bencana ini, dengan memadukan pendekatan dari atas (pemerintah) dan dari bawah (masyarakat)

Kata Kunci: manajemen risiko bencana, kelompok sadar bencana, lingkungan Sulawesi Selatan

1. Pendahuluan

Berbagai musibah yang melanda Indonesia 3 (tiga) tahun belakangan ini, seakan menyentil kesadaran masyarakat bahwa bumi Indonesia tempat kita semua berpijak mengalami masalah serius. Hubungan manusia dan alam, mengalami ketegangan yang berkepanjangan. Manusia tidak lagi ramah terhadap alam, dan alam pun menyambutnya dengan memberi bencana kepada manusia dan ini sudah berlangsung cukup lama dimulai dari tsunami Aceh tahun 2004, dan setiap tahun Indonesia ditimpa bencana banjir dan longsor. Di awal Januari tahun 2019, bencana banjir bandang juga menghantam sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan di penghujung tahun 2018, gempa dan tsunami menghantam Banten. Beberapa bulan sebelumnya, gempa dan tsunami juga menghajar Lombok (NTB) dan Palu (Sulawesi Tengah). Gejala apa semua ini? Dalam pandangan teologis, banyak yang mengatakan bahwa ini peringatan Tuhan – mungkin karena Tuhan telah murka dengan perilaku manusia dan masyarakat yang laku lajak (*over acting*). Manusia mengeksploitasi alam dengan rakusnya, tanpa menghiraukan kebutuhan alam itu sendiri. Dalam pendekatan sosiologi lingkungan, berbagai macam bencana alam yang timbul di Indonesia, karena telah terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Fungsi-fungsi lingkungan mengalami degradasi yang luar biasa, sehingga manusia dan masyarakat harus merasakan dampaknya.

Berangkat dari kondisi obyektif ini, penulis berupaya menggambarkan bencana alam yang muncul dengan implikasi sosialnya yang serius. Salah satu yang penulis fokuskan adalah bencana alam banjir besar yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terjadi di awal tahun 2019 dan manajemen risiko bencana seperti apa yang perlu ditumbuhkan dalam masyarakat?

2. Musibah Bencana Banjir di Sulawesi Selatan

Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), berduka. Di penghujung Januari tahun 2019 (tepatnya antara 22 sampai 24 Januari 2019), banjir bandang melanda Sulsel khususnya di 13 (tiga belas) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar dan Sinjai [1]. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tak kurang dari 106 desa dan 31 kecamatan yang terdampak bencana banjir tersebut. Bahkan ada 59 orang meninggal dan 25 orang lainnya hilang tanpa diketahui jasadnya. Dampak lainnya, terdapat 47 orang luka-luka, 6.596 orang yang terdampak dan sejumlah 3.481 orang yang mengungsi. Banjir juga menyebabkan sebanyak 79 unit rumah rusak dan 4.857 rumah terendam. Begitu juga, terdapat 11.876 hektare sawah rusak dan 10 jembatan rusak. Fasilitas ekonomi seperti pasar, ada 2 (dua) yang rusak parah. Fasilitas sosial, seperti sekolah dan rumah ibadah, juga puluhan yang rusak. Bahkan kantor pemerintah daerah pun, mengalami kerusakan yang parah.

Bagi masyarakat Sulsel, ini adalah kejadian luar biasa – yang tidak pernah dialami selama kurun waktu 10 sampai 20 tahun belakangan ini. Dari 13 kabupaten/kota yang mengalami musibah banjir bandang tersebut, yang terparah di kabupaten Jeneponto, Gowa, Maros, Takalar, Barru dan kota Makassar. Masyarakat tidak hanya mengalami kerugian material yang sangat besar, tetapi juga trauma yang cukup dalam. Hal ini karena masyarakat tidak menduga

sebelumnya, jika hujan yang mengguyur selama kurun waktu 4 (empat) hari berturut-turut, membawa kemalangan yang luar biasa. Dalam konteks nasional, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang rawan bencana alam. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia BNPB tahun 2019, disebutkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2014 sampai 2019), Sulsel termasuk 10 besar provinsi yang memiliki kejadian bencana paling tinggi di Indonesia. Rangking paling tinggi yaitu Jawa Tengah (2980 kejadian), Jawa Timur (1850 kejadian), Jawa Barat (1735 kejadian), Aceh (481 kejadian), Kalimantan Timur (400 kejadian), Sumatera Barat (364 kejadian), Sulsel (318 kejadian), Sumatera Selatan (317 kejadian), Banten (239 kejadian), dan Nusa Tenggara Barat (173 kejadian). Provinsi lainnya dibawah 100 sampai 150 kejadian, dan paling rendah adalah Papua Barat (hanya 22 kejadian) selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dari data ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan bencana di Sulsel, sangat tinggi. Menurut BNPB Provinsi Sulsel (2019), penyebab terjadinya bencana di Sulsel lebih disebabkan oleh daya dukung ekosistem yang makin mengkhawatirkan. Antara lain, daerah aliran sungai (DAS) di sejumlah wilayah yang sudah dalam kondisi sangat kritis, seperti Sungai Jeneberang di Gowa dan Sungai Kelara di Jeneponto. Begitu pula dengan sungai Lelopanggung Maros, sungai Tello di Makassar dan beberapa lainnya. Selain itu, curah hujan dan kelembaban yang tinggi disertai labilnya udara membuat pertumbuhan awan hujan sangat signifikan di wilayah tersebut. Yang juga turut mempengaruhi yaitu gelombang pasang di laut yang mencapai ketinggian 1,2 sampai 2,5 meter. Semua fenomena alam ini, memberi kesan bahwa kondisi fisik lingkungan di Sulsel memerlukan penanganan yang serius.

Namun masalah lain yang juga berkontribusi besar dalam bencana banjir di Sulsel adalah perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan. Sejak dulu masyarakat yang bermukim di lereng-lereng gunung dan di pinggir-pinggiran sungai seperti yang terjadi di Gowa, Jeneponto, Maros dan Makassar, melakukan perambahan dan pembalakan liar dalam bentuk penebangan pohon untuk pembukaan areal pertanian baru di hutan pegunungan dan melakukan usaha penggalian pasir di pinggir sungai yang berlebihan. Perambahan ini sudah berlangsung puluhan tahun, dan dampaknya baru dirasakan pada beberapa tahun belakangan ini. Sejak lima tahun terakhir, setiap musim hujan tiba pastilah beberapa kabupaten yang rentan di Sulsel mengalami musibah banjir, longsor dan lain-lain. Yang lebih ironis lagi, proses pembalakan yang umumnya liar dan juga penambangan pasir yang berlebihan di pinggir sungai, tidak mampu ditanggulangi dengan baik pemerintah setempat. Jika dianalisis secara umum, bencana banjir besar di Sulsel tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; (1) faktor alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, dengan kemampuan lingkungan menerima yang rendah, menyebabkan terjadinya banjir; (2) Sikap yang tidak peduli dan tidak ramah dengan lingkungan, juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya banjir, dan; (3) regulasi atau aturan dan kebijakan yang berasal pemerintah maupun pemerintah daerah, belum efektif dilaksanakan baik dalam konteks pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif). Akibatnya, pembalakan liar di pegunungan dan penggalian pasir di pinggir sungai – masih marak terjadi. Ini membuktikan bahwa fungsi dasar lingkungan hidup sebagai wadah atau ruang bagi kehidupan manusia yang lebih baik, semakin bermasalah karena terganggunya fungsi-fungsi lingkungan tersebut.

3. Fenomena Bencana Alam di Indonesia

Bencana banjir besar yang dialami masyarakat Sulsel, adalah fenomena dan gambaran umum dari kondisi alam Indonesia secara keseluruhan. Alam Indonesia yang dikenal sebagai “*gemah ripah loh jinawi*” (kekayaan alam yang melimpah), semua jenis tumbuhan dan buah-buahan ada disini bahkan banyak ahli yang menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa tumbuh seluruh jenis tumbuhan. Kandungan yang ada didalam bumi Indonesia pun, sangat banyak dan komplit. Mulai dari batu bara, tembaga, emas sampai uranium dan lain-lain. Di tahun 1970 an, Indonesia dikenal sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Saking kayanya alam Indonesia, Koes Plus grup musik legendaris bahkan pernah membuat syair lagu “*Orang bilang tanah kita tanah surga, tongka, kayu dan batu jadi tanaman*”. Bahkan Indonesia juga dikenal sebagai “*Zamrud Khatulistiwa*” (daerah tropis yang penuh keindahan).

Namun keadaan alam Indonesia yang menyimpan banyak kekayaan, ternyata juga menyimpan potensi bencana dan malapetaka yang sewaktu-waktu bisa meluluhlantakkan bumi Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terlentang dari dua samudera yaitu Pasifik dan Atlantik dan menjadi perlintasan internasional, oleh banyak ahli geologi dinyatakan sebagai daerah “*Cincin Api*” (Ring Of Fire) karena adanya pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasific. Sesuai dengan data geologis Indonesia (tahun 2014), lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. Sedangkan

dengan lempeng Pacific di utara Papua dan Maluku Utara Di sekitar lokasi pertemuan lempeng inilah terjadi akumulasi energi bertabrakan hingga pada titik lapisan bumi tidak mampu lagi menahan tumpukan energi dan akhirnya energi tersebut dilepas dalam bentuk gempa bumi. Karena itu, Indonesia dikategorikan sebagai daerah ancaman bencana gempa bumi dan tsunami yang berintensitas sangat tinggi, apalagi dengan kondisi gunung berapi yang masih aktif.

Itulah sebabnya menurut data geologi Indonesia (tahun 2014), bencana tsunami besar yang melanda Indonesia dalam kurun waktu 100 tahun, tercatat sebanyak 17 kali. Sebelumnya, tsunami besar berupa letusan gunung Krakatau tahun 1883, menewaskan lebih dari 36.000 (tiga puluh enam ribu) jiwa. Menurut catatan Direktorat Vulkanologi dan Mitrigasi Bencana Geologi (DVMBG) Kementerian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM, tahun 2014), sejumlah gempa dan tsunami besar yang terjadi di Indonesia antara lain; (1) tsunami besar Aceh dan sebagian Sumatera Utara pada tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 150.000 orang; (2) Gempa pulau Nias dan sekitarnya tahun 2005, menewaskan lebih dari 1.000 orang; (3) gempa di Jogjakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, yang menewaskan lebih dari 5.000 orang, dan; (4) bencana gunung merapi dan tsunami di Mentawai pada tahun 2010, yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Belum termasuk sejumlah gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia, dalam tiga tahun terakhir ini seperti di NTB, Sulteng dan lain-lain. Menurut DVMBG Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tahun 2014, terdapat 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Antara lain NAD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, DIY Jogja, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulut, Sulsel, Sulteng, Maluku Utara, Maluku selatan, Biak, Yapen dan fak-fak Papua da Balikpapan Kaltim.

Dari sisi geografis dan ekologis, kondisi Indonesia yang “ kaya raya “, juga menyimpan potensi bencana dan malapetaka yang luar biasa. Kondisi ini diperparah lagi dengan perilaku dan budaya masyarakat, yang seolah tidak bersahabat dengan alam. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tahun 2013, meningkatnya bencana ekologis baik frekuensi, intensitas dan sebaran, telah menunjukkan kolapsnya ekosistem di Indonesia. Daerah-daerah yang masif melakukan eksploitasi hutan untuk tambang dan perkebunan besar, terbukti paling banyak dilanda bencana ekologis. Menurut Walhi [2], di wilayah Sumatera, Aceh merupakan provinsi tertinggi yang mengalami bencana dan 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh seluruhnya tidak luput dari bencana. Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Daerah lain yang tingkat eksploitasi alamnya kecil, kondisinya masih terjaga seperti Maluku Utara dan lain-lain, dan risiko bencananya pun relatif kecil.

4. Menumbuhkan Kesadaran Bencana

Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam sangat karib dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tahun, ada saja bencana yang melanda negara “Gemah Ripah Loh Jinawe” ini. Bahkan tidak berlebihan jika Indonesia disebut sebagai “ laboratorium bencana “ di dunia. Sebab semua bencana yang diketahui oleh masyarakat dunia, sudah pernah terjadi di Indonesia. Masalahnya, bagaimana proses penanganan bencana agar tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih besar ?

Menurut Rendra Permana dalam makalahnya “ Mengubah Paradigma Penanganan Bencana di Indonesia” [3] problematika bencana alam di Indonesia, banyak disebabkan oleh; (1) pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana itu sendiri, masih sangat rendah. Bahkan pada masyarakat tertentu, bencana alam itu dinilai sebagai takdir yang harus diterima karena itu bentuk peringatan, ujian dan hukuman dari Tuhan yang harus diterima dengan ikhlas, sabar dan tabah; (2) Pemahaman dan pengetahuan tentang bencana yang rendah, membuat masyarakat memiliki sensitivitas kebencanaan yang sangat pasif., dan; (3) karena pemahaman dan pengetahuan serta perilaku masyarakat tentang kebencanaan rendah dan pasif, maka terbentuklah budaya kebencanaan yang sangat lemah. Ini yang kemudian memberi justifikasi bahwa budaya bencana kita masih pada tanggap darurat dan rekonstruksi/rehabilitasi yang nota bene adalah reaksi yang bersifat insidental. Budaya bencana masyarakat, belum pada upaya mitigasi atau pun kesiapan.

Pandangan Rendra ini, jika dianalisis dengan realitas yang terjadi di masyarakat Sulsel khususnya kabupaten dan kota yang mengalami bencana alam banjir bandang, maka dapat digambarkan bahwa pengetahuan dan pemahaman kebencanaan masyarakat yang rendah, menyebabkan perilaku masyarakat sangat pasif terhadap masalah bencana. Ini yang kemudian membuat budaya bencana masyarakat yang sangat lemah. Indikasi ini dapat dilihat misalnya masyarakat yang bermukim di sekitar atau pinggiran sungai seperti di sungai Jeneberang (Gowa), Kelara (Jeneponto), Lekopaccing (Maros) dan Tello (Makassar) dan yang bertempat tinggal di lereng-lereng gunung seperti gunung

bawakaraeng (gowa) dan lain-lain. Sebenarnya bencana banjir itu, mereka alami setiap tahun baik dalam intensitas yang sedang maupun besar (bandang). Namun upaya antisipatif terhadap bencana tahunan itu, tidak pernah ada. Sehingga setiap tahun (pada musim hujan), masyarakat di pinggiran sungai dan lereng gunung itu – pasti bertemu dengan bencana. Yang selalu ada pada setiap bencana adalah tindakan kuratif dan bukan preventif (pencegahan).

5. Manajemen Risiko Bencana Berbasis Kelompok

Pemahaman dan pengetahuan tentang bencana alam, ternyata tidak hanya menjadi masalah masyarakat. Namun jika dikaji secara mendalam, para tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal, juga belum banyak yang menyadari pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang bencana alam. Di sisi lain, regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut, juga tidak memberi ruang dan dukungan kepada masyarakat untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kebencanaan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana misalnya, sama sekali tidak mengatur tentang peran serta masyarakat dalam berkontribusi pada upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana alam. Padahal yang perlu ditumbuhkan dalam masyarakat adalah adanya perilaku yang adaptif dan preventif terhadap bencana, yang pada gilirannya memunculkan budaya kebencanaan yang kuat.

Karena itu, upaya serius yang harus dilaksanakan dalam konteks manajemen risiko bencana adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama merumuskan manajemen risiko bencana yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari antisipasi bencana. Salah satu caranya melalui pendekatan pemberdayaan (empowering), yang intinya adalah; (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang; (2) membangun daya, mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkannya, serta; (3) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Berkaitan dengan ini, Mas'ood (1990) menegaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, maka tahap-tahap yang dilakukan didalam upaya meningkatkan kepedulian secara umum, yaitu; (1) tahap penyadaran (awareness), terkait dengan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana; (2) tahap pengorganisasian yaitu membentuk kelompok masyarakat sadar bencana pada daerah-daerah yang rawan bencana; (3) tahap intervensi, yaitu menyusun dan melakukan program dan kegiatan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bencana kepada masyarakat; (4) tahap evaluasi yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terkait program dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sadar bencana, dan; (5) tahap tindak lanjut yaitu melakukan kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Urgensi pembentukan kelompok sadar bencana di setiap daerah rawan bencana, didasarkan pada; (1) adanya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk melakukan upaya preventif terhadap bencana; (2) belum maksimalnya kepedulian, tanggung jawab dan peran pemerintah, pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di sekitar daerah bencana; (3) tugas *civil society* sebagai pendamping dan penghubung (*channeling*) bagi kelompok sadar bencana, dan; (4) proses edukasi bagi masyarakat yang lebih besar, terkait kesadaran bencana.

6. Kesimpulan dan Saran

Dari paparan dan penjelasan di atas, diperoleh sejumlah kesimpulan yaitu :

1. Bencana banjir bandang yang dialami oleh masyarakat Sulsel, selain karena faktor alam juga disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan pembalakan dan penambangan pasir yang berlebihan.
2. Fenomena yang terjadi di Sulsel merupakan bagian dari fenomena bencana alam di Indonesia, dan ini harus dipahami oleh masyarakat, agar tercipta kesadaran bahwa Indonesia adalah wilayah “ cincin api “ (*ring of fire*) yang setiap saat membawa bencana alam dan lain-lain.
3. Pendekatan penanggulangan bencana alam di Indonesia, masih didominasi pendekatan evakuasi, pencarian, penyelamatan, pembuatan posko, penempatan pengungsi, dapur umum, distribusi bantuan, pembersihan puing-puing atau longsor sampai pada perbaikan sarana dan prasarana fisik yang hancur akibat bencana yang sifatnya adalah tindakan kuratif dan bukan preventif (pencegahan).
4. Untuk membangun pendekatan preventif, maka perlu dibuat kelompok sadar bencana di masyarakat yang fungsinya adalah meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bencana. Serta

menumbuhkan perilaku masyarakat yang aktif dan antisipatif terhadap bencana, yang pada akhirnya menciptakan budaya bencana yang kuat.

5. Pembentukan kelompok sadar bencana di daerah-daerah rawan bencana, adalah bagian dari manajemen risiko bencana yang bersifat preventif.

Dari sejumlah kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu :

1. Undang-Undang yang mengatur penanggulangan bencana harus direvisi untuk mengatur pelibatan dan peran serta masyarakat didalam penanggulangan bencana.
2. Peranan pemerintah dan pemerintah daerah, harus lebih aktif dan memprioritaskan pendekatan preventif dibanding kuratif.
3. Perlu dirumuskan sinergitas yang optimal antara pemerintah dan pemerintah daerah, kelompok *civil society* dan masyarakat, dalam pembentukan kelompok-kelompok sadar bencana di seluruh Indonesia.

Referensi

- [1] _____. "Berita Banjir di Sulsel ". Harian Tribun Timur 24 Januari 2019
- [2] _____. "Jurnal Penanggulangan Bencana ". Volume 4 Nomor 2, November 2013. Pusat Data Informasi dan Humas BNPB - Jakarta
- [3] Rendra Permana. 2016 " Mengubah Paradigma Penanganan Bencana di Indonesia ". Makalah, Jakarta
- [4] Catoon, W and R Dunlap. 1978 " Environmental Sociology : A New Paradigm ". The American Sociologist, Washing State University
- [5] Nurjanah, dkk. 2012. " Manajemen Bencana ". Penerbit Alfabeta Bandung